

## PUPR LANJUTKAN PROYEK TRANS PAPUA BARAT JALUR MAMEH-WINDESI



*Foto: betahita.id*

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Papua Barat Direktorat Jenderal Bina Marga tahun ini akan melanjutkan pengerjaan proyek strategis nasional Jalan Trans Papua Barat jalur Mameh-Windesi sepanjang 120 kilometer (km). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.1 Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah IV Bintuni Papua Barat Zaki Akram di Manokwari, Sabtu, mengatakan tahun ini jajarannya akan mengerjakan jalan sepanjang 36 km pada jalur Mameh-Windesi. "Untuk tahun anggaran 2022 sudah dianggarkan untuk 36 km. Kementerian PUPR menargetkan jalur ini rampung pada 2024," kata ZAkri. Dia menyebutkan bahwa pada 2021 Trans Papua Barat jalur Mameh-Windesi telah dilakukan pengaspalan sepanjang 13 kilometer pada segmen satu dan 7 kilometer pada segmen dua. Pekerjaan jalan tersebut, katanya, dilakukan secara bertahap sesuai usulan anggaran.

Adapun pengerjaan lanjutan jalur tersebut tahun ini terbagi atas dua segmen pengerjaan, yakni segmen pertama sepanjang 26 km, dan segmen kedua 10 km. "Pekerjaan di lapangan masih berjalan, kami pastikan 36 kilometer dalam dua segmen akan tuntas sebelum kontraknya berakhir pada 31 Desember," katanya. Zakri tidak menampik dengan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan seperti kondisi alam dan letak geografis maupun akses telekomunikasi di daerah-daerah blank spot. "Tetapi kendala itu tidaklah menyurutkan semangat kami untuk terus bekerja, dan kami juga harapkan dukungan dari masyarakat lokal sepanjang jalur Trans Mameh-Windesi untuk sama-sama menyukseskan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo demi kemajuan pembangunan infrastruktur Papua Barat," ujarnya.

Trans Papua dan Papua Barat merupakan proyek strategis nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditargetkan akan menembus jalan sepanjang 3.462 km. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan membangun Jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km. "Infrastruktur ini akan membuka wilayah yang masih

terisolasi selama ini, serta meningkatkan akses dan konektivitas baik dari darat maupun multimoda," ujar Basuki dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR.

Pada 2021, penanganan Jalan Trans Papua di Papua mencapai 139 km dan di Papua Barat mencapai 120 km yang meliputi pembangunan jalan baru, serta pembukaan jalan dan peningkatan struktur/perkerasan. Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur tahun anggaran (TA) 2021 untuk Provinsi Papua Barat dialokasikan sebesar Rp 3,75 triliun. Perinciannya, Rp 543,27 miliar digunakan untuk bidang SDA, jalan dan jembatan Rp 2,66 triliun, permukiman Rp 312,23 miliar dan perumahan Rp 228,83 miliar. Saat ini progres fisik pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat sebesar 44,09 persen dan keuangan sebesar 42,9 persen.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://papuabarat.antarane.ws.com/> , PUPR lanjutkan proyek Trans Papua Barat Jalur Mameh-Windesi, 22 Mei 2022, diakses pada tanggal 2 Juni 2022;
2. <https://republika.co.id/> , Proyek Trans Papua Barat Jalur Mameh-Windesi Lanjut 36 KM Tahun Ini, 22 Mei 2022, diakses pada tanggal 2 Juni 2022;
3. <https://hariandewata.com/> , Proyek Trans Papua Barat Jalur Mameh-Windesi Lanjut 36KM Tahun Ini, 23 Mei 2022, diakses pada tanggal 2 Juni 2022;
4. <https://betahita.id/> , Trans Papua Jalur Mameh-Windesi Sepanjang 36 KM Lanjut Tahun Ini, 23 Mei 2022, diakses pada tanggal 2 Juni 2022.

#### **Catatan :**

- ❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, pada :
  - Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
- ❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pada:
  - Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
  - Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa RPJM Nasional merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah

pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

→ Pasal 2 ayat 3 yang menyatakan bahwa RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: